

langkah awal implementasi, pemerintah Kabupaten Blitar pada 2009 ini, akan menutup semua lokalisasi di Blitar. Rencana inilah yang mendapat reaksi sangat keras dari para pekerja seks. Mereka berdampingan dengan sejumlah NGO melakukan protes dalam berbagai cara.

Pada 23 juni 2009, di aula lokalisasi Tanggul, Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, para pekerja seks se-Kabupaten Blitar berkumpul. Mereka bersepakat mengancam akan melakukan aksi telanjang apabila Bupati Blitar, Herry Noegroho, sampai menandatangani Perda tersebut. Untungnya aksi nekad ini urung dilakukan karena berhasil diredam oleh sejumlah aktifis NGO yang mendampingi mereka (KOMPAS, 24 Juni 2009).

Deni Saputra, fasilitator dari *The Post Institute* Blitar yang mendampingi para pekerja seks, mengarahkan mereka untuk menempuh jalur musyawarah dan mendesak DPRD Blitar untuk meninjau ulang pemberlakuan Perda tersebut.

Aksi Berlanjut

Para Pekerja Seks se-Blitra akhirnya benar-benar *ngeluruk* kantor DPRD Kabupaten Blitar pada 4 Agustus 2009. Mereka mengancam menduduki gedung wakil rakyat dan tidak akan pergi dari gedung DPRD sampai pihak legislatif mau menemui mereka. Anehnya, para anggota dewan memilih menghindar dan tidak mau menerima mereka. Hal itu yang mengakibatkan ratusan pekerja seks ini marah. Selain meneriaki dewan banci, massa juga nekat melakukan *sweeping* (Sindo, 4 Agustus 2009).

Aksi nekar para pekerja seks inilah yang memaksa para anggota dewan akhirnya menyerah. Satu persatu wakil rakyat ini akhirnya keluar dari ruangan untuk menemui mereka. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1 jam. Para pekerja seks mendesak dewan untuk membatalkan Perda No. 15/2008. Atas desakan ini, ketua DPRD Blitar, M. Taufich, menyatakan kesanggupannya untuk mengkaji ulang Perda tersebut. Politisi dari PDI Perjuangan ini berjanji akan melakukan revisi jika memang pasal dari Perda dianggap tidak mampu melindungi para pekerja seks. Berkaitan dengan penutupan lokalisasi, M. Taufich juga meyakinkan bahwa lokalisasi tidak perlu ditutup semua, melainkan dipusatkan di satu lokasi.

Setelah mendapat desakan dari sejumlah NGO dan pekerja seks, bupati Blitar, Herry Noegroho, juga mengatakan kesediaannya untuk mengubah kebijakan yang dicetuskan dalam Perda pelarangan prostitusi. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini berencana akan melokalisir para PSK di lokalisasi Ngreco Kec Selorejo, bukan menutup seluruhnya. "Jadi yang ditutup hanya di Talun dan Srengat. Semua PSK ini akan dilokalisir di Selorejo," paparnya.

Meski sudah mengantongi janji dari Bupati dan ketua DPRD untuk merevisi Perda, para pekerja seks ini tidak berhenti untuk melakukan protes. Terakhir, mereka berencana membuat film dokumenter sebagai usaha menjelaskan kepada publik dan pembuat kebijakan tentang kondisi real kehidupan sosial ekonomi mereka yang terancam bila Perda No. 15/2008 benar-benar diberlakukan.

Rencananya, film dokumenter ini berdurasi 45 menit. Para pekerja seks di lokalisasi Tanggul, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun; lokalisasi Poluhan, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat; dan Ngreco, Kec Selorejo, berusaha memperlihatkan kondisi real kehidupan sosial ekonomi mereka dalam berbagai adegan gerak dan dialog. Menurut keterangan Mawan Wahyudin, direktur *The Post Institute*, film dokumenter ini merupakan wujud protes PSK atas dikeluarkannya Perda No 15, Tahun 2008 tentang pelarangan lokalisasi se Kabupaten Blitar. "Kita tidak hanya melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi legislatif dan eksekutif untuk bernegosiasi. Namun protes juga kita kemas dalam sebuah film dokumenter," ujar Mawan (Okezone.com, 21 Agustus 2009).

Perda Cacat

Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI) tentang analisis kinerja DPRD Kabupaten Blitar tahun 2004-2009 menilai bahwa, Perda No 15 Tahun 2008 masih memerlukan berbagai pertimbangan, perluasan data dan pemikiran yang mendalam. Hal ini tidak lepas dari latar belakang kelahiran Perda yang terkesan hanya sekadar target hasil. Bagaimana tidak, Perda ini menjadi salah satu pertimbangan untuk perolehan *Jawa Pos Otonomi Award*.